

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik (Parpol) mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, karena dalam sistem demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat, dan rakyat yang memegang kekuasaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan tersebut secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk dengan pemilihan umum (Pemilu), yang peserta Pemilunya adalah Parpol. Budiardjo (2008:404) menyatakan bahwa Parpol merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita- cita yang sama, tujuan dari kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik, merebut kekuasaan, serta mempertahankan kedudukan politik dengan cara konstusional untuk melaksanakan programnya. Untuk itu, dalam negara yang demokratis Parpol menyelenggarakan sejumlah fungsi, yaitu sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik (termasuk fungsi kaderisasi), dan pengatur konflik (Budiardjo, 2008: 405).

Rekrutmen dan kaderisasi Parpol menjadi fungsi strategis dalam membesarkan nama parpol, melalui fungsi ini Parpol mencari dan memperluas anggota dan mencetak kader potensial dari anggotanya untuk disiapkan sebagai pengurus Parpol, jabatan publik di legislatif maupun pemerintah yang berkualitas. Ini merupakan asumsi dasar konsep rekrutmen dalam konteks sistem politik demokrasi.

Rekrutmen politik dan kaderisasi politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan

menjalankan pemerintahan direkrut dan disiapkan. Parpol menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik, pada fungsi ini partai politik melakukan proses menyeleksi, menjaring dan melatih calon-calon pemimpin yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang dapat menyalurkan aspirasi dan mengemban amanat dari masyarakat. Melalui kaderisasi politik, individu dipersiapkan menjadi calon pemimpin yang tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat. Partai politik yang mempunyai kader-kader partai yang berkualitas, diasumsikan tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan kader yang berompentensi sebagai calon pemimpin di pemerintahan yang baik, amanah, yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Berdasar hal ini, diasumsikan semua Parpol akan melakukan memperluas anggota dan menyiapkan kader, termasuk melalui organisasi sayap yang merupakan kepanjangan tangan Parpol.

Penelitian ini menduga setiap Parpol mempunyai pola atau sistem rekrutmen dan kaderisasi sesuai dengan sistem pemikiran dan strategi yang dikembangkan oleh masing-masing Parpol, yang berdasar Undang-Undang Parpol maupun Undang-Undang Pemilu merupakan wilayah internal Parpol atau disebut sebagai demokrasi internal partai. Penelitian ini memaknai pola rekrutmen politik sebagai aktifitas partai politik dimulai dari penerimaan anggota, penyeleksian kader, sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis. Sedangkan kaderisasi politik sebagai aktivitas pembinaan kualitas kader.

Sejumlah studi memang menemukan kaderisasi politik belum menjadi prioritas bagi partai politik di Indonesia. Sejak masa Orde Baru hingga Era Reformasi situasinya

tidak berubah, mayoritas Parpol masih mengandalkan figur, ketenaran bahkan dinasti, untuk meraih dukungan dalam Pemilu. Parpol juga tidak berpayah mendidik kadernya, melainkan menerapkan kaderisasi instan dengan merekrut tokoh-tokoh yang dianggap populer atau mapan secara finansial untuk memperoleh suara terbanyak dalam suatu Pemilu, misalnya Parpol merekrut selebritis untuk diajukan dalam Pemilu, terlepas hal itu dapat merusak proses regenerasi di dalam tubuh Parpol dan mencederai mekanisme demokrasi internal partai. Penelitian Ghiffary dan Fitriyah (2020) menemukan kaderisasi di DPP Partai Golkar, yang merupakan salah satu Parpol tertua, juga tidak berjalan dan lebih mengandalkan kader instan termasuk dinasti. Lalu bagaimana dengan Parpol baru?. Sementara sejak Pemilu era reformasi lahir banyak Parpol baru lahir, bahkan dalam Pemilu 2019 ada empat Parpol baru yang ikut sebagai peserta Pemilu. Temuan sebaliknya didapat dari penelitian Deby Triasa (2012) yang juga meneliti soal kaderisasi Partai Golkar tetapi kasus di DPD Jawa Tengah justru menemukan ada pola kaderisasi yang terlembaga. Berdasar dua penelitian yang dilakukan di Partai Golkar, pusat dan wilayah, dengan temuan yang berbeda ini, mendorong peneliti untuk menelitinya di lingkup lebih sempit, soal kaderisasi oleh Partai Golkar di tingkat kabupaten/kota.

Kaderisasi politik dilakukan Parpol kepada anggota dan bukan anggota (Harris, 2016). Kepada anggota atau penguatan secara internal dilakukan melalui konsolidasi internal partai, sementara untuk perluasan basis massa pada eksternal partai dapat dilakukan dengan melalui organisasi sayap atau juga sering disebut dengan *underbow* partai politik (Harris, 2016). Peran organisasi sayap ini sebagai jembatan bagi Parpol

untuk menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan sumber massa.

Keberadaan organisasi sayap Parpol di Indonesia secara legal baru dijamin negara dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 12 Ayat (10) yang menyatakan bahwa “Salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Pengakuan dan jaminan yuridis ini merupakan dasar sekaligus peluang bagi pengembangan struktur partai untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat.

Berdasarkan telaah Pandiangan (2015) atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing organisasi sayap Partai politik Peserta Pemilu 2014, ditemukan secara umum organisasi sayap punya fungsi melakukan kaderisasi. Tabel 1.1 berikut menjelaskan temuan dimaksud.

Tabel 1.1 Fungsi Sayap Partai Politik

No.	Partai Politik	Fungsi di Parpol	Pengaturan
1	Partai NasDem	Bagian penyelenggara kader di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi	AD Partai NasDem Pasal 13.
2	PKB	Perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat	ADPKB Pasal 44 (1)
3	PKS	?	?
4	PDIP	Melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar	AD PDIP Pasal 54 (2)

No.	Partai Politik	Fungsi di Parpol	Pengaturan
		basis Partai	
5	Partai Golkar	Wadah perjuangan pelaksana kebijakan partai guna memenuhi kebutuhan strategis guna memperkuat basis dukungan partai	AD Partai Golkar Pasal 28
6	Partai Gerindra	Sebagai sumber anggota yang berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu perjuangan Partai Gerindra melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	ART Partai Gerindra Pasal 23 (1)
7	Partai Demokrat	Wadah kaderisasi dan perjuangan pelaksanaan kebijakan partai guna memenuhi kebutuhan strategis memperkuat basis dukungan partai	AD Partai Demokrat Pasal 97
8	PAN	Membantu dewan pimpinan partai melakukan konsolidasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang dan atau kelompok-kelompok tertentu guna mencapai tujuan partai	ART PAN Pasal 58
9	PPP	Organisasi massa/profesi/kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada dan bernaung di bawah PPP, yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri	AD PPP, Pasal 76 (8).
10	Partai Hanura	Organisasi sayap berfungsi sebagai wadah perjuangan partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategi dalam memperkuat basis dukungan.	ART HANURA, Pasal 20 (1).

Sumber: Pandiangan (2015)

Data dalam tabel 1.1 di atas menunjukkan organisasi sayap menjadi salah satu pintu bagi seorang kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik

dan militan untuk mampu bersaing secara kapasitas intelektual dan memiliki visi yang jelas sesuai dengan platform partai politik. Kata lain, organisasi sayap diberi peran sebagai salah satu pintu kaderisasi partai. Peneliti tertarik untuk mengangkat peran organisasi sayap perempuan pada dua Parpol, yakni Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan yang keduanya membentuk sayap partai perempuan yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Garda Wanita Malahayati dari Partai NasDem. Keberadaan sayap partai perempuan relevan dengan kebijakan legal kuota dalam pencalonan yang diberlakukan sejak Pemilu 2004 dan makin diperketat, termasuk dalam hal pemberian sanksi, di pemilu berikutnya. Dalam konteks ini peneliti menduga organisasi sayap perempuan lebih luwes melakukan peran rekrutmen dan kaderisasi mengingat ada kecocokan identitas antara pengurus dan calon anggota/kader. Berdasar penjelasan ini, maka penelitian ini bermaksud meneliti pola kaderisasi politik melalui sayap partai perempuan, studi pada Partai Golkar yang merupakan salah satu partai tertua dan Partai NasDem yang merupakan partai baru pecahan Partai Golkar. Penelitian dilakukan di Kota Semarang, sebagai pusat pemerintahan di Jawa Tengah diasumsikan partai-partai politik mengelola organisasinya di kota besar dengan lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola kaderisasi politik oleh Partai Golkar dan Partai NasDem Kota Semarang melalui sayap partai perempuan?

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh sayap partai perempuan Partai Golkar dan Partai NasDem Kota Semarang dalam kaderisasi politik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa pola kaderisasi politik oleh Partai Golkar dan Partai NasDem Kota Semarang melalui organisasi sayap partai perempuan.
2. Menganalisa hambatan dalam pelaksanaan kaderisasi politik

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk studi Pemilu dan Parpol.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah informasi para pelaku politik, pengurus partai politik, dalam melakukan fungsi kaderisasi politik bagi anggota partai perempuan melalui organisasi sayap bidang perempuan.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar menumbuhkan kemampuan dalam meneliti.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kaderisasi dan sayap partai politik sudah ada yang melakukan. Tentu ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, Sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Ghiffary Asy Syaukani dan Fitriyah (2020) dengan judul “Pragmatisme Kaderisasi Internal DPP Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus di DPP Partai Golkar)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui mengapa terjadi pragmatisme dalam kaderisasi internal di DPP Partai Golkar dalam melaksanakan perkaderan partainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasilnya menjelaskan bahwa pragmatisme yang terjadi di kaderisasi internal DPP Partai Golkar disebabkan oleh banyak fakto, yakni penerapan Sistem Proporsional Terbuka, menjadikan Partai Golkar cenderung pragmatis, yaitu memandang kader-kadernya maupun calon kadernya dari seberapa besar kemungkinan mereka untuk bisa membawa Partai Golkar meraih suara dan pengaruh dari masyarakat. Pertimbangan pragmatis digolongkan sebagai ADP (Aktivis, Darah biru, dan Pengusaha) 3 golongan ini dianggap lebih menguntungkan Partai Golkar dibanding kader lainnya.
2. Penelitian oleh Deby Triasa (2012) dengan judul “Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus DPD Golkar Jawa Tengah)”. Alasan yang melatarbelakangi penulis dalam karya ilmiah ini adalah bahwa Partai

Golkar telah melahirkan kader-kader baru yang notabene berasal dari golongan pengusaha maupun profesi lainnya dan dipercaya menjadi pemimpin partai maupun menempati posisi-posisi strategis di organisasi, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintahan di era reformasi ini. Perubahan ini menciptakan paradigma baru Partai Golkar dimana Partai Golkar telah ikut mereformasi internal partai sejalan dengan bergulirnya reformasi untuk merubah citra partai di masa Orde Baru, yaitu sebagai partai pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai Golkar dalam merekrut calon anggota Partai Golkar, mengetahui kaderisasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar untuk melahirkan kader-kader partai sesuai dengan paradigma baru Partai Golkar, dan mengetahui pelembagaan politik Partai Golkar dalam rangka memperkuat internal maupun eksternal, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik Partai Golkar di era reformasi bersifat terbuka dan tidak menyiapkan tim seleksi dalam rekrutmen calon anggota partai. Temuan lain, pelembagaan politik Partai Golkar belum sempurna karena masih ada ketergantungan partai terhadap pihak-pihak yang berasal dari non partai, khususnya masalah dana.

3. Penelitian oleh Amaliya Hidayatul Fajrina (2017) yang berjudul “Strategi Rekrutmen Partai Gerindra dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya”. Penelitian ini membahas tentang strategi rekrutmen oleh Partai Gerindra

dalam melakukan kaderisasi pemuda di Kota Surabaya. Studi ini menggunakan Teori Rekrutmen Politik Michael Rush dan Philip Althoff. Data diperoleh melalui *indepth interview*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra di Kota Surabaya memiliki beberapa strategi dalam melakukan rekrutmen kader muda, diantaranya adalah sistem terbuka, namun terkadang juga ditemukan sistem patronase didalamnya. Hasil penelitian juga menunjukkan model strategi rekrutmen sistem figur masih menjadi strategi yang populer. Diketahui bahwa semua strategi tersebut memberi kesempatan secara luas dan terbuka kepada seluruh muda-mudi Indonesia yang merasa memiliki minat dan kemampuan untuk bergabung bersama dalam Partai Gerindra di kota Surabaya.

4. Penelitian oleh Aditya Surya dan Agus Satmoko (2015) yang berjudul “Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik (Studi Pada DPC PDI-P Kabupaten Nganjuk)”. Penelitian ini mengkaji pola kaderisasi kepemimpinan khususnya pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki secara cermat sistem kaderisasi kepemimpinan, cara kerja dan pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan di DPC PDI Perjuangan Kab. Nganjuk. Serta faktor pendukung dan penghambat pola kaderisasi kepemimpinan partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kaderisasi kepemimpinan partai politik terdiri dari proses rekrutmen, seleksi kader, dan pendidikan kader

di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk di atur dalam anggaran rumah tangga partai ketetapan kongres III PDI Perjuangan No.09/TAP/KongresIII/PDI-P/2010 BAB I mengungkap penetapan calon anggota dan anggota yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Adapun faktor pendukung adalah kekompakan dan pemahaman yang sama terhadap ideologi Pancasila, sedangkan faktor penghambat adalah sebagian anggota yang tidak memahami ideologi Pancasila sebagai tugas partai.

5. Penelitian oleh Bayu Mitra Adhytama Kusuma dan Theresia Octastefani (2017) tentang sayap partai dengan judul “Negoisasi Dakwah Dan Politik Praktis (Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis) dilatar belakangi dengan agama Islam yang sering digunakan sebagai basis ideologi dan perjuangan di era demokrasi, umat Islam saat ini memiliki berbagai saluran politik melalui partai politik Islam. Setiap partai memiliki kepentingan yang berbeda meskipun sama-sama menggambarkan dirinya sebagai partai dakwah atau rumah politik Muslim Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi sayap keagamaan Islam oleh partai politik nasionalis lebih pada politik dakwah daripada dakwah. Sehingga dalam negosiasi antara dakwah dan politik praktis, aspek politik lebih diuntungkan daripada aspek dakwah.

Berdasar pada kajian penelitian terdahulu penelitian ini melanjutkan penelitian serupa yang sudah dilakukan oleh Giffari dan Fitriyah di DPP Partai Golkar dan oleh

Deby Triasa di DPD Partai Golkar Jawa Tengah, kasus yang diangkat dalam penelitian ini di DPD Partai Golkar Kota Semarang. Berikutnya yang berbeda, penelitian ini fokus pada kaderisasi oleh organisasi syap bidang perempuan dan dibandingkan dengan Partai NasDem, partai baru pecahan dari Partai Golkar.

1.5.1 Kaderisasi Partai Politik

Menurut Budiardjo (2008:160-161), Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota- anggotanya memiliki orientasi, nilai- nilai, dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk memperoleh kedudukan politik. Carl J. Friedrich yang dikutip Budiardjo (2008: 403) mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Definisi yang resmi terkait pengertian partai politik di Indonesia adalah sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa partai politik adalah “Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”.

Partai politik memiliki sejumlah fungsi, di dalam negara demokratis fungsi dari partai politik, seperti yang dikatakan oleh Budiardjo (2008:163-164) sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Partai memiliki tugas menyalurkan beberapa pendapat dan aspirasi dari masyarakat dengan dirumuskan seemikian rupa untuk diperjuangkan sebagai masukan kebijakan pemerintah. Disamping itu partai juga berfungsi menyampaikan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar disebar luaskan kepada masyarakat secara umum.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses pengenalan keadaan politik di suatu negara dimana seseorang dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang sedang berlangsung. Dalam upaya menguasai pemerintahan, partai berusaha menciptakan kesan bahwa ia memeperjuangkan aspirasi umum.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutment politik

Partai politik memiliki fungsi dalam mencari dan merekrut orang-orang yang dipandang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik untuk dididik sebagai anggota dan disiapkan menjadi pemimpin.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Partai politik berfungsi mengatur kemungkinan terjadinya konflik akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Konflik yang ada kemudian dilembagakan menjadi masukan dan alternatif kebijakan bagi pemerintah.

Surbakti (1992: 116) menegaskan bahwa fungsi utama partai politik adalah

mencari dan mempertahankan kekuasaan yang bertujuan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Adapun caranya dalam sistem politik demokrasi melalui kepersertaannya dalam pemilu. Lebih jauh Surbakti (1992: 117) menambahkan bahwa fungsi utama dilaksanakan dalam bentuk tiga kegiatan yang meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan di legislatif dan/atau eksekutif. Selain fungsi utama, Surbakti (1992, 117-121) memerinci fungsi lain dari partai politik menjadi tujuh fungsi, yakni sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik.

Untuk menjalankan fungsi utama partai politik yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu, maka fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik adalah fungsi yang praktiknya banyak dilakukan oleh partai politik (Haris *et al*, 2016: 19), bahwa partai politik berperan dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin dalam sistem politik. Konteks mempersiapkan calon-calon pemimpin merujuk pada fungsi kaderisasi, sebagaimana disebutkan oleh Haris *et al* (2016: 19), bahwa di dalam rekrutmen secara tidak langsung berjalan pula proses kaderisasi.

Menurut Triwidaryanta, (2008:13), kaderisasi adalah proses mencari bibit-bibit unggul dari anggota partai politik melalui kegiatan sistematis, berkelanjutan dan terarah berkaitan dengan senang hati akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi. Kaderisasi bisa dibilang sebagai suatu ajang pendidikan kader untuk mengetahui dan mengembangkan potensi individu para kader dengan cara menanamkan ide serta mentransfer pengetahuan, agar dapat memunculkan kader-kader

yang siap dan tangguh dalam menghadapi dinamika politik, juga memenuhi kebutuhan regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan untuk mempertahankan eksistensi organisasi.

Triwidaryanta, (2008:14) menjelaskan bahwa kaderisasi organisasi dapat dipetakan dalam dua poin, pertama, mengenai para pelaku kaderisasi itu, dan kedua, adalah sasaran dari pelaksanaan kaderisasi. Pelaku kaderisasi adalah sebuah individu atau suatu kelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sasaran kaderisasi adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi.

Menurut Haris *et al* (2016: 50) kaderisasi lebih bersifat sebagai suatu internalisasi partai politik dalam melakukan peningkatan kapabilitas para kader untuk menjalankan tugas tugas partai sebagai fungsionaris, sehingga para kader mampu menjalankan amanat yang ditugaskan oleh partai baik dalam menjadi pengurus maupun menjadi pejabat publik di tingkat pusat maupun tingkatan daerah. Kaderisasi partai politik pun menjadi sarana memproduksi kepengurusan dan kepemimpinan periode lanjutan dari organisasi tersebut. Oleh karena kaderisasi harus dilakukan secara profesional. Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai.

Selanjutnya, Haris *et al* (2016: 50-51) menjelaskan bahwa untuk memudahkan

mengetahui adanya kaderisasi atau tidak dalam sebuah partai, ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator. Pertama, adanya kurikulum atau silabus kaderisasi. Kedua, adanya divisi yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara kaderisasi. Ketiga, ada rentang waktu yang jelas untuk masing- masing level penjenjangan kaderisasi. Keempat, output dari rentang kaderisasi berupa capaian kapasitas yang disasar dari masing-masing level kaderisasi. Menurut Haris *et al* (2016: 52) kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Terbuka, prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (training) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Prinsip terbuka ini sangat penting untuk para anggota partai politik karena hak bagi seluruh kader partai yang tergabung untuk mendapatkan pengajaran dan nilai yang sama sebagai satu kesatuan keluarga partai politik. Akan jadi hal yang berbeda jika kaderisasi tidak memiliki prinsip yang terbuka karena partai hanya akan mengalami konflik internal yang akan merusak partai itu dengan sendirinya Karena ada kemungkinan pilih kasih atau anak emas yang nantinya membuat kecemburuan antar satu kader dan yang lainnya.
2. Non-Diskriminatif, pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang

yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti dan/atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip ini juga penting sama seperti yang dijelaskan pada point sebelumnya karena semua memiliki kesempatan yang sama besar tanpa melihat suku, agama, dan ras. Jika kaderisasi yang dilakukan bersifat diskriminatif, maka orang-orang akan memandang sebelah partai tersebut.

3. Berjenjang, penjenjangan kaderisasi partai politik didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Perjenjangan ini bermanfaat dalam mempertajam para kader mengenai nilai-nilai dan visi yang dibawa oleh partai agar menjadi kader yang terbaik yang bisa menempatkan posisi jabatan di partai ataupun dipemerintah sesuai dengan jenjang yang sudah dilalui, tentu semakin tinggi jenjang maka semakin tinggi posisi yang mungkin bisa di raih oleh kader tersebut.

Haris *et al.* (2016:51) menekankan perlunya partai politik untuk menciptakan pola pembinaan kader yang tidak saja terprogram terukur, sistematis, tetapi juga komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader. Pola pembinaan kader ini yang mencakup:

1. Tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus;

2. Model rekrutmen yang terbuka dan demokratis;
3. Sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan;
4. Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi;
5. *Affirmative action* dalam rekrutmen dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai, untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partai politik, parlemen dan jabatan publik lainnya
6. Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan kelompok sasaran, kaderisasi oleh partai politik dibedakan atas dua model (Haris *et al*, 2016: 54) , yakni:

1. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik

Secara umum partai politik modern melakukan proses kaderisasi untuk internal kadernya, yakni bagi anggota yang telah terdaftar yang membayar iuran keanggotaan secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan mendapatkan *training* tertentu oleh partai politik dengan tujuan tertentu pula. Kaderisasi anggota parpol dilakukan secara sistematis,

berjenjang dan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus.

2. Kaderisasi untuk non anggota partai politik

Organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik, organisasi sayap partai adalah sumber penting kaderisasi partai politik. Organisasi sayap partai politik digunakan sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai. Melalui sayap partai ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya.

Berdasarkan pada tahapan urutan atau penjenjangan pengkaderan, dibedakan sesuai tingkatan dasar sampai tertinggi sebagai kader partai, sebagai berikut (Haris *et al*, 2016: 55-58) :

1. Kaderisasi Tingkat Pertama

Kaderisasi tingkat pertama biasanya lebih menekankan pada aspek internalisasi ideologi, visi dan misi parpol. Kaderisasi pada tingkat pertama bias bertujuan untuk membangun budaya dan konsolidasi partai politik pada peserta kaderisasi. Selain internalisasi nilai-nilai partai politik, pada tingkat ini proses kaderisasi juga dipergunakan untuk membekali anggota partai mengenai ketrampilan manajerial dan tata kelola partai yang bersifat sederhana. Manajerial partai bersifat teknis seperti penyelenggaraan rapat,

perencanaan program, pelaksanaan program, kampanye, penggalangan dan hal-hal lainnya terkait dengan tata kelolapartai. Kaderisasi pada tingkat pertama ini biasanya dilakukan juga pelatihan tentang masalah kepemimpinan, strategi pemenangan pemilu, komunikasi dengan media dan juga *public speaking* yang bersifat sederhana. Kaderisasi untuk tingkat pertama ini ditunjukkan untuk anggota parpol atau sayap partai yang akan diproyeksikan menjadi pengurus partai ditingkat kabupaten/kota dan/atau anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota, serta kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Bagi kader yang diproyeksikan menjadi pengurus partai atau anggota badan-badan perwakilan ada tingkat kabupaten/kota maka perlu diberikan tambahan pembekalan mengenai penapan fungsi pengawasan, anggaran dan legisasi, melakukan lobi, komunikasi politik, serta pembuatan kebijakan dan evaluasi kebijakan sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas di tingkat kabupaten/kota.

2. Kaderisasi Tingkat Madya

Kaderisasi tingkat madya ini bisa dirancang untuk menghasilkan pengurus partai tingkat provinsi dan/atau anggota DPRD tingkat provinsi serta Kepala Daerah tingkat provinsi *outcome*-nya pengurus tingkat provinsi, anggota DPRD dan kepala daerah tingkat provinsi. Pada kaderisasi jenjang ini biasanya para kader lebih banyak dibekali ketrampilan terkait dengan pemanangan pemilu seperti ketrampilan komunikasi politik, kepemimpinan, komunikasi interpersonal terkait mobilisasi massa,

keterwakilan politik dan *problem solving skill*, serta pembuatan kebijakan, termasuk strategi-strategi kampanye. Pada kaderisasi jenjang madya, durasi dan kurikulum modul biasanya lebih detail dengan potensi peningkatan kapasitas dan ketrampilan manajerial terkait pemenangan pemilu, baik di Lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan daerah jauh lebih banyak ketimbang internalisasi budaya partai-partai dan konsolidasi partai. Dalam kaitan peningkatan ketrampilan manajerial, kaderisasi tingkat madya biasanya diperuntukkan untuk meningkatkan ketrampilan tentang kontribusi partai politik dalam pemenangan pemilu, selain urusan tata kelola parpol untuk tingkat provinsi.

3. Kaderisasi Tingkat Utama

Kaderisasi tingkat utama diperuntukkan bagi calon pengurus partai politik, anggota legislatif tingkat pusat, serta calon presiden dan wakil presiden. Pada kaderisasi tingkat utama ini selain masalah internalisasi nilai-nilai partai, pengetahuan tentang masalah kepemiluan baik yang menyangkut masalah regulasi maupun strategi pemenangan pemilu, juga diberikan pengetahuan manajerial yang menyangkut pemahaman tentang masalah-masalah dan isu- isu pada skala nasional dan global, pemahaman tentang kebijakan partai di tingkat nasional, lingkungan strategi internasional serta pemahaman mengenai system ekonomi, hukum, pemerintahan, hubungan internasional. Pemahaman hal-hal tersebut juga dengan peningkatan keterampilan kader dalam hal komunikasi politik, *lobbying*, kepemimpinan.

Ketrampilan kepemimpinan dan komunikasi politik khususnya terkait dengan komunikasi public, persoalan- persoalan representasi dan *problem-solving-skill* untuk persoalan-persoalan di tingkat nasional, kemampuan untuk membuat kebijakan di DPR dan pemerintahan, kemampuan manajemen waktu, serta peningkatan pengetahuan tentang teknologi informasi khususnya berhubungan dengan masalah-masalah pemilihan dan pembuatan kebijakan yang didalamnya juga menyangkut persoalan relasi media.

1.5.2 Sayap Partai Politik

Organisasi sayap merupakan sebuah organisasi bagian dari partai politik yang akan membantu kinerja partai politik dalam menyentuh seluruh lapisan masyarakat (Haris *et al*, 2016: 54). Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 12 ayat (10) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap sendiri menurut adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (10) “Partai politik Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Sebagaimana dengan maksud ayat tersebut, maka fungsi organisasi sayap partai politik yaitu mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang merupakan kebutuhan bagi peningkatan daya kritis dan

partisipasi politik rakyat dalam kehidupan demokrasi, membimbing dan mendampingi serta memberikan advokasi terhadap masyarakat agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak-hak politiknya. Dengan memaksimalkan peran organisasi sayap partai politik, sebagai pilar utama kaderisasi, dan penguatan kader, maka secara otomatis proses seleksi kader untuk duduk sebagai legislatif maupun eksekutif akan lebih mengedepankan kualitas intelektual, serta basis massa pendukung dan bukan basis ekonomi.

Organisasi sayap partai politik dapat berupa organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh, organisasi tani, organisasi profesi, organisasi keagamaan (Haris *et al*, 2016: 54), dan kelompok-kelompok rakyat yang terorganisasi sesungguhnya merupakan sumber daya yang harus dibina dan terus dikembangkan dalam sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai. Organisasi sayap partai politik ini menjadi sumber penting dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik (Haris *et al*, 2016: 54). Organisasi sayap yang dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang pada gilirannya mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik secara elegan dan bermartabat, karena organisasi sayaplah yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan program-program partai politik, sedangkan partai politik nampak apabila ada kegiatan-kegiatan politis.

Keberadaan partai politik sering membuat organisasi sayap baru, jika segenap mencari dukungan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Begitu juga

dengan keberadaan partai politik yang tidak dapat terpisahkan dengan sistem demokrasi, bahkan menjadi syarat utama mewujudkan sistem tersebut. Melalui partai politik kebijakan dibuat dengan mekanisme proses pembuatan produk perundang-undangan. Sehingga keberadaan organisasi sayap sangat dibutuhkan guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja partai politik yang berada di legislatif, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal ini dilakukan dengan peran kader organisasi sayap yang menjadi politisi partai politik tertentu, sementara pengawasan eksternal dilakukan demonstrasi dan kritikan melalui media massa.

1.5.3 Sayap Partai Politik Perempuan

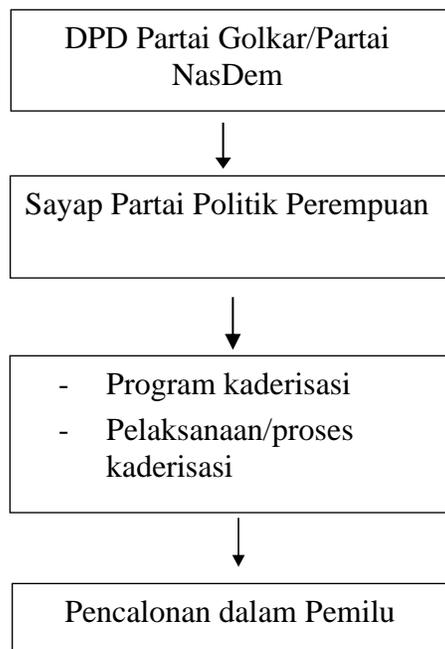
Sebagai *Intermediary* agent yang menghubungkan antara negara dengan warga negara, partai politik memiliki karakter ideologi, program, pengorganisasian partai politik yang berbeda satu sama lain termasuk soal keterwakilan perempuan. Hampir semua partai politik di Indonesia memiliki pengorganisasian khusus perempuan. Pasca diterapkannya kebijakan afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan, penguatan partisipasi politik perempuan di internal partai juga dapat dilihat dari *pertama*, keberadaan divisi perempuan di dalam struktur partai sebagai upaya untuk menjamin kehadiran perempuan dalam proses pembuatan keputusan, dan *kedua*, keberadaan organisasi sayap perempuan yang bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat keterwakilan perempuan.

Puskapol UI dan MPI (2017) menjelaskan bahwa ada tiga hal mengapa partai politik di Indonesia membentuk bidang khusus perempuan dalam struktur kepartaian

ataupun organisasi sayap partai perempuan: *Pertama*, sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan akan representasi politik perempuan. Dalam struktur kepartaian ataupun organisasi sayap partai menjadi lumbung rekrutmen partai politik secara khusus bagi perempuan yang akan mencalonkan di eksekutif maupun legislatif yang memiliki ketentuan *affirmative action* 30 % pencalonan perempuan dalam legislatif. *Kedua*, institusionalisasi kepartaian dalam rangka penguatan pengakaran partai (*Party rooting*) terutama dikalangan penduduk dan pemilih perempuan. *Ketiga*, dibentuknya bidang khusus perempuan dalam struktur partai menjadi sarana agregasi sekaligus artikulasi kebijakan partai politik yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat pada skema yaitu:



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Kaderisasi Parpol

Kaderisasi adalah proses internalisasi dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individu para anggotanya agar mampu menjadi fungsionaris partai baik dan siap menjalankan mandat yang diberikan partai untuk menduduki jabatan public dipusat dan daerah.

Untuk mengetahui adanya program kaderisasi melalui sayap partai dalam partai politik yang diteliti, digunakan indikator:

1. adanya kurikulum atau silabus kaderisasi;
2. adanya divisi yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggaraan kaderisasi;
3. ada rentang waktu yang jelas untuk masing-masing level penjenjangan kaderisasi;
4. *output* dari rentang kaderisasi berupa capaian kapasitas yang disasar dari masing-masing level kaderisasi.

Untuk mengetahui pelaksanaan atau prosesnya, digunakan indikator prinsip-prinsip kaderisasi:

1. Kaderisasi terbuka

Kaderisasi dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training*) dan kegiatan- kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. kegiatan kaderisasi.

2. Kaderisasi non-diskriminatif

Kaderisasi membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku.

3. Kaderisasi berjenjang

Kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat, atas penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau lainnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Sudarwan Danim, (2020:51) menjelaskan bahwa tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Menurut Bogdan dan Taylor, Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moeloeng, (2000:3) menjelaskan penelitian kualitatif adalah 3 prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Efek yang terjadi adalah kecenderungan yang sedang berkembang yang berkenaan dengan masalah ini, meskipun tidak jarang juga mempertimbangkan peristiwa masa lampau dengan pengaruh terhadap masa kini. Menurut Moelung (2002:89) penelitian deskriptif tepat digunakan dalam ilmu perilaku karena berbagai bentuk tingkah laku

yang menjadi pusat perhatian penelitian dapat sengaja diatur dalam latar realitas, yaitu berkenaan dengan berbagai variabel, menguji hipotesis dan mengembangkan generalisasi yang memiliki validitas universal.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukandi Kota Semarang. Alasan pemilihan lokasi penelitian, ditentukan dengan sengaja dengan pertimbangan wilayah Kota Semarang merupakan daerah basis pendukung terhadap Partai NasDem dan Partai Golkar.

1.8.3 Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, (2008:300) teknik *purposive sampling* pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah penentuan informan dengan alasan orang atau informan dianggap tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis dan bersedia menjadi informan Berdasar pada kriteria informan di atas, informan penelitian adalah:

1. Suryanto, Pengurus DPD Partai Nasdem Kota Semarang , saat ini menjadi anggota DPRD Kota Semarang
2. Iswanti Yuni Asih, sebagai Ketua Garda Wanita Malahayati Kota Semarang merangkap pelaksana tugas Ketua Garda Wanita Malahayati Jawa Tengah
3. Jumiwati, sebagai pengurus Garda Wanita Malahayati Kota Semarang
4. H. Anang Budi Utomo, M.Pd, Sekertaris Partai Golkar Kota Semarang, saat ini mejadi anggota DPRD Kota Semarang
5. Padmasari Mestikajati, S.Ip, M.Si, Pelaksana tugas ketua Kesatuan

Perempuan Partai Golkar Jawa Tengah, saat ini menjadi anggota DPRD Jawa Tengah

6. Atik Kusmiati, SH, sebagai pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kota Semarang

1.8.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Yang termasuk klasifikasi data primer adalah hasil wawancara dengan informan yang telah di jelaskan dalam subyek penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang tersusun atau terstruktur.
- b. Dokumentasi, Data dari penelusuran dokumen yang digunakan diperoleh dari data- data tertulis dari DPD sayap partai Nasional Demokrat dan sayap partai Golongan Karya Kota Semarang tentang konsep strategi, program- program yang dimiliki, gambar kegiatan atau pelaksanaan program yang telah dilakukan dan laporankegiatan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2010:244) mengungkapkan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di kumpulkan dari hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, mensintesa data, menyusun data ke dalam pola-pola, memilah mana data yang penting, dan membuat kesimpulan agar data dapat dipahami dengan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Model yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan penelitian dalam studi pustaka, dokumen, dan wawancara bila diperlukan serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana yang dikode dan mana yang dibuang, semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2010:249) dengan melakukan

penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian atau display data merupakan kegiatan penyusunan dari kumpulan informasi yang diperoleh, sehingga memunculkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan penyajian data yaitu untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yang ada. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali.

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2010:253), kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara *continue* selama berada di lapangan. Mulai dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka tetapi kesimpulan sudah disediakan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan

intersubjektif, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan atas suatu temuan dalam kumpulan data yang lain.